

## ABSTRAK

Persoalan dominasi dan intervensi korporasi dalam politik nasional dan persoalan korupsi yang diakibatkan sistem demokrasi liberal secara tidak langsung mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Keadaan ini dapat mengakibatkan *distrust* publik terhadap pemerintahan yang kemudian dapat berujung pada terganggunya stabilitas politik Indonesia saat ini. Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa sistem demokrasi liberal saat ini mengakibatkan rentannya suatu negara menjadi negara korporatokrasi yang melandaskan pemerintahan dan demokratisasinya dengan kepentingan kalangan kapitalis dan untuk itu mengakibatkan marginalitas terhadap masyarakat yang ada. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang Rekonstruksi Sistem Pemilihan presiden yang berbasis keadilan.

Tujuan penelitian tentang Proses pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia yang sudah berjalan selama ini, kelemahan proses pelaksanaan pemungutan suara secara manual pada pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia dan rekonstruksi pemungutan suara pada pemilihan umum yang berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Pokok kajiannya adalah tentang hukum, berada dalam ranah hukum dalam arti yang luas. Hukum memiliki banyak wajah sehingga menyediakan perdebatan yang luas tentang berbagai penafsiran terhadap konsep dan terminologi di dalamnya.

Hasil penelitian ini adalah Rekonstruksi Pasal 3, 6A, Dan Pasal 22.E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang di pilih secara perwakilan di parlemen melalui MPR menciptakan suasana politik yang aman damai dan lebih cepat. Karena penerapan sistem yang lebih mudah dan praktis serta tidak berbelit-belit. Dalam proses pemilihan presiden yang di laksanakan bermusyawarah dan mufakat akan menjadikan politik yang lebih arif santun dan bijaksana. Pencalonan presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi DPR paling sedikit 25% ini akan semakin meminimalisasi pasangan calon yang dapat maju ke tahap pemilihan presiden. Sehingga, kelemahan adanya lebih dari dua pasangan calon akan teratasi. Dengan dua pasangan calon tersebut akan lebih memaksimalkan tujuan demokrasi dalam sistem pemilihan presiden tersebut dengan mengaplikasikan teori hukum progresif

Hasil rekonstruksi sehingga melahirkan teori hukum baru yaitu *Teori Efficiency Election* yang artinya pemilihan presiden yang hemat, cepat, selamat dan tepat untuk mengevaluasi, membuat perbandingan dengan proses pemilihan saat ini. Teori ini digunakan agar dapat mencapai suatu tujuan dengan sumber daya minimal namun hasilnya maksimal.

Kata Kunci : Pemilihan Presiden, Rekonstruksi.

## ABSTRACT

The issue of corporate domination and intervention in national politics and the problem of corruption caused by the liberal democratic system indirectly results in poverty and inequality in Indonesia. This situation can lead to public distrust of the government which can then lead to disruption of Indonesia's current political stability. Based on the various explanations above, it is clear that the current liberal democratic system results in the vulnerability of a country to a corporatocracy that underlies its governance and democratization with the interests of the capitalists and therefore causes marginality towards the existing society. This research will discuss further about the Reconstruction of Electoral Systems justice-based president.

The purpose of research on the process of the implementation of presidential elections in Indonesia that has been running so far, the weakness of the process of implementing the manual voting in elections held in Indonesia and the reconstruction of the voting in elections based on justice values

The method of approach used in this paper is sociological legal research (sociological research). The paradigm used in this study is the constructivist paradigm. The subject of the study is about law, being in the realm of law in the broadest sense. The law has many faces so as to provide a broad debate about the various interpretations of the concepts and terminology in it.

The results of this study are the Reconstruction of Articles 3, 6A, and Article 22.E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The election of the President and Vice President elected by parliament through the MPR creates a peaceful and faster political atmosphere. Because the application of the system is easier and more practical and not convoluted. In the presidential election process, which is held by deliberation and consensus, it will make politics more sensible and prudent. Presidential nominations by political parties or a combination of political parties that have at least 25% DPR seats will further minimize the pair of candidates who can advance to the presidential election stage. Thus, the weakness of the existence of more than two pairs of candidates will be overcome. With these two pairs of candidates it will further maximize the objectives of democracy in the presidential election system by applying progressive legal theory

The results of the reconstruction so that gave birth to a new legal theory, the Efficiency Election Theory which means that presidential elections are efficient, fast, safe and appropriate to evaluate, make comparisons with the current election process. This theory is used in order to achieve a goal with minimal resources but maximum results

Keywords: Presidential Election, Reconstruction.